



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWIN GUNAWAN HUTAPEA
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 276052

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **14.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
3. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 7.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **2.252.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV 1,5 TURBO Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000
4. MOBIL, LEXUS RX350H Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.385.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **2.000.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **5.234.757.228**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **25.471.757.228**



III. HUTANG

Rp. 2.111.912.394

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 23.359.844.834

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.